

***Social Capital* dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri di Kabupaten Tegal**

Hafsoh Labibatul Islam, Desiderius Priyo Sudibyo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
Email : hafsoh2002@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan penyandang dan menganalisis peran *social capital* dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah ditemukan dianalisis dengan analisis data interaktif dan validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori tiga tahapan proses pemberdayaan dan tiga bentuk *social capital* dalam pemberdayaan yang dilakukan Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilihat dari ketiga tahapannya telah mampu dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat keterbatasan partisipasi penyandang disabilitas dan hari pelaksanaan pemberdayaan karena keterbatasan anggaran. Adapun *social capital* memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas diantaranya terlaksananya kegiatan pelatihan dan akses pasar serta didapatkannya dukungan pendanaan dan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan.

Kata Kunci: Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM), *Social capital*, Pemberdayaan penyandang disabilitas

Abstract

This study aims to examine the process of empowering people with disabilities and analyze the role of social capital in empowering people with disabilities by the Slawi Mandiri Disabled Community (DSM). This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The data that has been found is analyzed with interactive data analysis and the validity of the data used is source triangulation. This research uses the theory of the three stages of the empowerment process and three forms of social capital in the empowerment carried out by the Slawi Mandiri Disabled Community (DSM). The results showed that the empowerment activities of persons with disabilities seen from the three stages have been able to be implemented properly. However, there is still limited participation of persons with disabilities and days of empowerment implementation due to budget constraints. Social capital has a role in the implementation of empowerment activities for persons with disabilities, including the implementation of training activities and market access as well as obtaining funding support and assistance in empowerment activities.

Keywords: social capital, empowerment of person with disabilities, Slawi Mandiri Disabled Community (DSM)

Pendahuluan

Pada hakikatnya, semua manusia mempunyai hak asasi manusia atau *human rights* dari sejak mereka lahir yang mana tidak hanya berlaku untuk orang-orang dengan fisik yang sempurna, tetapi juga untuk orang-orang yang kurang sempurna dari rata-rata orang, yang mana kondisi tersebut dapat dikenal juga dengan penyandang disabilitas. Hingga kini penyandang disabilitas dikenal sebagai kelompok yang termajinakan dalam masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan fisiknya sehingga penyandang disabilitas kerap kali mengalami perlakuan diskriminasi dan tidak terpenuhinya hak yang seharusnya mereka dapatkan. Keterbatasan dan adanya perlakuan diskriminasi yang kerap dialami oleh penyandang disabilitas menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan, perekonomian dan pendidikan yang di dapatkan penyandang disabilitas. Dalam Rifai, A.A dan Humaedi, S. (2020 : 450) disebutkan bahwa dengan jumlah penyandang disabilitas di dunia yang lebih dari 1 miliar, terdapat sekitar 82 persen diantaranya berada di negara berkembang yang hidup dibawah garis kemiskinan dan mengalami tingkat kekerasan yang tinggi, serta menjadi salah satu kelompok yang paling terpinggirkan atau termajinakan dalam situasi krisis. Bank Dunia juga memperkirakan bahwa 20 persen dari kaum miskin dunia adalah penyandang disabilitas.

Indonesia sendiri telah berupaya dalam memberikan dan hak-hak kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang inklusif. Dalam peraturan perundang-undangan, jaminan hak bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A sampai 28J. Pada tahun 2007, Indonesia menandatangani konvensi internasional tentang disabilitas dari PBB tentang Hak untuk Penyandang Disabilitas. Kemudian, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi landasan hukum pada berbagai program dan juga kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan jaminan hak bagi penyandang disabilitas. Meskipun telah ada landasan hukum atas hak bagi penyandang disabilitas, dalam kenyatannya penyandang disabilitas masih kerap mengalami berbagai tindakan diskriminasi dalam memperoleh kehidupan yang layak. Menurut Hanifa dalam Hidayatullah dan Pranowo (2018 : 196) sekitar 80 persen penyandang disabilitas di Indonesia mengalami tindakan diskriminasi, termasuk kecenderungan pengabaian aksesibilitas terhadap hak pelayanan dasar diantaranya kurangnya akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak. Padahal aksesibilitas merupakan bentuk kemudahan yang seharusnya disediakan

untuk penyandang disabilitas supaya dapat mewujudkan kesamaan hak dalam segala aspek kehidupan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung program bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan yakni suatu upaya membangun kekuatan melalui dorongan, motivasi dan kesadaran dalam berusaha mengembangkan potensi dan kapasitas seseorang (Fahrudin, 2012:96). Pemberdayaan untuk penyandang disabilitas diperlukan agar penyandang disabilitas dapat meningkatkan kapasitasnya dengan disediakannya sarana pengembangan peningkatan kapasitas yang memadai. Adapun paradigma gerakan hak disabilitas yang menekankan harkat dan martabat penyandang disabilitas untuk menikmati hidup atas dasar kesetaraan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 2011; CBM, 2012; Penyandang Disabilitas Australia, 2015 salah satu cara yang dilakukan adalah pendekatan berbasis hak terhadap disabilitas diwujudkan melalui keterlibatan aktif penyandang disabilitas melalui organisasi perwakilan seperti Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO) (Young, R, Reeve, M dan Grills, N, 2016 : 46). Organisasi penyandang disabilitas dapat menggunakan beberapa nama berbeda seperti Kelompok Swadaya Disabilitas (KSM) dan kelompok/komunitas Penyandang Disabilitas.

Masalah terkait penyandang disabilitas juga dialami oleh Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Berdasarkan TNP2K Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2018 Kabupaten Tegal memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak keempat di Provinsi Jawa Tengah yakni dengan presentase 5,1 persen atau 12.286 Jiwa. Adapun pada Open Data Kabupaten Tegal, pada tahun 2019 jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal berjumlah 12.292 jiwa. Dengan jumlah yang dapat dikatakan tidak banyak tersebut tentu perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab bagi semua pihak baik pemerintah, sector non-pemerintah serta masyarakat/komunitas. Meskipun Pemerintah Kabupaten Tegal sendiri telah memiliki regulasi dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, akan tetapi kenyataannya penanganan dan rehabilitasi sosial disabilitas yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal masih belum maksimal. Hal tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, dimana masih terdapat isu pokok masalah yang menjadi urusan Dinas Sosial Kabupaten Tegal yakni belum maksimalnya layanan bantuan sosial dan bantuan akses layanan pendidikan dan juga kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas.

Dengan masih adanya permasalahan bagi penyandang disabilitas dan keterbatasan pemerintah dalam memberikan layanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas, maka masyarakat atau komunitas mempunyai peluang untuk ikut andil terlibat dalam memberikan hak kesejahteraan sosial dimana hal

tersebut merupakan hak yang seharusnya didapatkan untuk penyandang disabilitas. Terdapat komunitas yang berperan dalam membantu pemerintah Kabupaten Tegal yaitu, salah satunya Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM). Di Kabupaten Tegal, sendiri terdapat beberapa komunitas yang mewadahi penyandang disabilitas, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1
Komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal

Komunitas	Keanggotaan	Jumlah anggota
Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM)	Mencakup berbagai jenis penyandang disabilitas di antaranya tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, ekstrauma dan difabel dari Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OPYMK).	166
Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia	Penyandang tunanetra muslim	87
Cerebral Palsy Trengginas (CPT)	Penyandang Cerebral Palsy	121
Gerkatin	Penyandang tunarungu dewasa dari usia 17 tahun	151
Mari Belajar Bimbingan Belajar Anak Autis (Marble)	Anggota keluarga yang mempunyai anak dengan autisme/ anak berkemampuan khusus	30
Dunia Tak Lagi Sunyi (DTLS)	Penyandang disabilitas tunarungu anak	62

Sumber : wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Komunitas DSM dan Komunitas CPT, diolah

Dalam penelitian ini, komunitas yang dijadikan menjadi focus penelitian adalah Komunitas Difabel Slawi Mandiri. Berdasarkan pada data diatas, dari enam komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal, yang membedakan Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) dengan komunitas penyandang disabilitas yang lainnya adalah dari sisi keanggotannya, dimana komunitas DSM memiliki keanggotaan penyandang disabilitas yang mencakup berbagai jenis penyandang disabilitas di antaranya tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, ekstrauma dan difabel dari Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OPYMK). Sedangkan dari jumlahnya, komunitas DSM telah memiliki jumlah terbanyak

anggota komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal yaitu 166 anggota. Tak hanya itu, komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) telah kebersamaian dengan Pemerintah Desa untuk melakukan kampanye desa inklusi guna mengurangi stigma negative dan diskriminasi masyarakat pada penyandang disabilitas. Dari tahun 2019 sampai sekarang Komunitas DSM sedang dalam proses menjalankan proyek kampanye desa inklusi yang diinisiasi melalui pengembangan desa inklusi. Dikutip dari Pantura post (2023), Komunitas DSM telah mendorong diwujudkannya pengembangan desa inklusi hingga diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Desa Inklusi. Program desa inklusi yang dijalankan komunitas DSM berjalan dengan dukungan NLR Indonesia telah dideklarasikan pada 29 Desember 2022 dengan komitmen dari beberapa dinas terkait, pemerintah desa camat, dan pendamping difabel.

Keterlibatan Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) dalam membantu Pemerintah Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan pemberdayaan pada penyandang disabilitas berupa pemberian pelatihan, pengawasan dan pendampingan pada penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas serta melakukan kerjasama dengan berbagai sector, yang mana hal tersebut karena komunitas tersebut pasti memiliki modal sosial didalamnya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) masih terdapat kendala, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, dimana tempat pelatihan dan juga mobilitasnya masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya kendala tersebut, komunitas harus menjalin jaringan social dan hubungan kerjasama (*bridging* dan *linking*) dengan berbagai pihak supaya pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan.

Woolcock (1998 : 153) menerangkan bahwa *social capital* yakni kapabilitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu kelompok maupun komunitas yang menunjuk pada proses membangun jaringan, norma dan kepercayaan sosial untuk mencapai tujuan bersama. Komunitas yang memiliki *social capital* yang akan mengantarkan kelompok/komunitas tersebut untuk menyalurkan modal yang mereka miliki yang kemudian disalurkan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan masyarakat. Adapun dalam konteks pemberdayaan, Ife & Tesoriero (2014) menyatakan bahwa peran *social capital* dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu modal yang dapat dijadikan sebagai penggerak dalam pemberdayaan, dimana *social capital* memberikan dukungan kepada masyarakat untuk melakukan *collective-action* dan diperolehnya timbal balik. Beberapa penelitian menyatakan bahwa *social capital* berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat, hal tersebut seperti terjadi di Afrika Selatan, dimana dikatakan *social capital* dapat mempengaruhi keterampilan dan peluang pengembangan dan pekerjaan dilihat bagaimana jaringan sosial dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas (Ebrahim,

A., et al, 2022). Kemudian dalam penelitian Choi, E dan Yi, B (2022) menyatakan bahwa diperlukan *social capital*, termasuk hubungan sosial dan kepercayaan, dalam pemberdayaan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, banyak komunitas penyandang disabilitas yang telah berupaya untuk melakukan pemberdayaan pada penyandang disabilitas, salah satunya Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM). Komunitas Difabel Mustika (DBM) dalam melakukan kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas masih mengalami kendala dikarenakan kurangnya modal sosial yang dimiliki oleh Komunitas DBM (Setiyaningsih, K dan Yuliani, S., 2022).

Pemberdayaan penyandang disabilitas jika dilihat dalam bentuk *social capital* dapat berupa *bonding* (merujuk pada ikatan anggota komunitas), *bridging* (jaringan antar kelompok/komunitas yang sama) serta *linking* (hubungan dengan kelompok *powerless*). Dengan ini, pemberdayaan dan *social capital* menjadi berkaitan yang mana dimensi-dimensi *social capital* tersebut akan menentukan efektivitas komunitas dalam *governance*. Dengan demikian, maka judul dari penelitian ini yakni “*Social Capital* dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Komunitas Difabel Slawi (DSM) di Kabupaten Tegal”.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan dan menganalisis *social capital* dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM). Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan data sekunder yang didapatkan melalui literatur, buku-buku, atau dokumen terkait. Pengukuran variable penelitian ini menggunakan teori Ambar Teguh Sulistyani (2017 : 82), dimana terdapat tiga tahapan pemberdayaan, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan, serta tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan. Selain itu, pengukuran juga dilakukan dengan menggunakan teori Woolcock (2001 : 10-11) yang menjelaskan *social capital* sebagai jaringan sosial dapat di bedakan menjadi tiga yaitu *bonding social capital*, *bridging social capital*, *linking social capital*. Dalam penelitian ini, Informan di pilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dimana peneliti memilih informan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016 :85). Melalui pertimbangan sumber data atau orang yang dianggap kompeten dan paling mengetahui tentang kegiatan pemberdayaan dalam Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) informan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal, wakil ketua Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM), pengurus dan anggota Komunitas

Difabel Slawi Mandiri (DSM) serta Ketua komunitas Cerebral Palsy Trengginas (CPT) Kabupaten Tegal. Data yang telah diperoleh kemudian diuji dengan triangulasi sumber dan kemudian dianalisis dengan analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2016 : 246-253) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM)

Menurut Eddy yang disebutkan dalam Zubaedi (2013 : 21), pemberdayaan diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi suatu masyarakat untuk membangun kapasitas. Upaya pemberdayaan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) dalam penelitian ini dilihat dari tiga tahap pemberdayaannya sebagaimana menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2017 : 77) tahapan-tahapan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Menurut Ambar teguh Sulistiyani (2017 :82), tahap penyadaran dan pembentukan perilaku diartikan sebagai tahap penyadaran tentang hak yang seharusnya dimiliki dan pembentukan kesadaran perilaku dan peduli pada kelompok sasaran pemberdayaan. Penyadaran tersebut berupa pengetahuan yang bersifat kognitif, *belief* dan *healing* untuk meningkatkan kesadaran diri sampai merasa dibutuhkannya peningkatan kapasitas dalam diri. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) pada tahap penyadaran yakni sebagai berikut :

a. *Home visit*

Kegiatan *home visit* merupakan usaha pendekatan yang dilakukan oleh pengurus Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) untuk memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas supaya muncul rasa percaya diri (*belief*) dan dihargai akibat stigma negative yang ada pada masyarakat maupun keluarga. Pendekatan juga dilakukan kepada keluarga penyandang disabilitas yaitu dengan memberikan pengertian dan motivasi pada orang tua penyandang disabilitas bahwa bukan hanya anaknya saja yang mengalami keterbatasan fisik tetapi yang lebih parah darinya itu ada.

Selain itu, diberikan pengetahuan juga untuk keluar bersosialisasi dengan masyarakat dan mandiri dengan mengenal potensi yang ada dalam dirinya (*kognitif*). Dalam kegiatan *home visit*, penyandang disabilitas yang dikunjungi juga diberikan pengetahuan tentang ketahanan tubuh (*healing*) sesuai dengan kebutuhannya. Beragamnya macam disabilitas membuat penting

untuk memahami ketahanan tubuh, seperti ketika mengunjungi penyandang disabilitas mental, pengurus yang datang menyampaikan untuk tidak terlalu banyak pikiran.

b. Pelatihan motivasi dan pengembangan diri difabel dan OPYMK

Kegiatan pelatihan motivasi dan pengembangan diri difabel dan OPYMK merupakan kegiatan baru atas program pengembangan desa inklusi, yang mana dalam kegiatannya berisi penyampaian pengetahuan tentang pengembangan diri dan juga motivasi serta sharing-sharing hal yang telah dialami oleh penyandang disabilitas supaya membangun rasa peduli pada sesama.

c. Temu Komunitas

Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) memfasilitasi pertemuan dengan lima komunitas penyandang disabilitas lainnya di Kabupaten Tegal untuk saling *sharing* kendala dalam organisasi, yang mana hal tersebut rutin diadakan dalam tiga bulan sekali. Dari sharing permasalahan tersebut Komunitas DSM juga memberikan arahan dan mencari solusi bersama untuk pengembangan organisasi kedepannya dan mendapatkan poin-poin keberlanjutan untuk memperjuangkan isu disabilitas di Kabupaten Tegal secara bersama-sama.

d. Kelompok Perawatan Diri (KPD)

Kelompok Perawatan Diri (KPD) merupakan kegiatan yang diadakan satu bulan sekali sebagai tindakan pencegahan dini dan kekebalan tubuh (*healing*) bagi penyandang kusta dan OPYMK) baik yang sudah berobat maupun sedang berobat. Kegiatan KPD juga turut di isi dengan sharing dan motivasi tentang pengalaman dan perkembangan luka yang dialami penyandang kusta dengan petugas kusta dan dokter dengan harapan bisa tetap berbaur dengan masyarakat seperti pada umumnya

e. Pertemuan rutin

Kegiatan pertemuan rutin dilakukan setiap sebulan sekali pada hari rabu di minggu kedua, yang mana kegiatan tersebut dimaksudkan untuk koordinasi pengembangan organisasi dan kegiatan komunitas untuk kedepannya serta pembinaan dalam berorganisasi. Di luar pertemuan rutin oleh pengurus komunitas DSM, seringkali pula diadakan pertemuan santai anggota komunitas DSM untuk sharing-sharing baik terkait masalah, pelatihan maupun pengalaman-pengalaman.

2. Tahap Transformasi Pengetahuan dan Kecakapan Ketrampilan

Menurut Ambar teguh Sulistiyani (2017 :83), tahap kedua dalam proses pemberdayaan yaitu tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan, yang mana diartikan sebagai proses memberikan potensi dalam diri sasaran pemberdayaan. Transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) berupa pemberian kegiatan pelatihan yang diadakan karena kerjasama dengan pihak pemerintah dan non-pemerintah. Informasi pelatihan yang Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) terima kemudian disampaikan pada anggota komunitas yang memiliki potensi dan minat pada pelatihan tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) dalam tahap ini diantara sebagai berikut :

a. Pelatihan Menjahit

Kegiatan pelatihan menjahit merupakan pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang dilaksanakan selama tiga bulan pelatihan dan di adakan dua kali dalam satu tahun. Kegiatan pelatihan menjahit berisi penyampaian teori yang disampaikan oleh narasumber selama satu minggu, dan minggu berikutnya kemudian praktik membuat pola, menggunting, dan menggunakan mesin jahit

b. Pelatihan tata boga dan kewirausahaan

Pelatihan tata boga dan kewirausahaan juga merupakan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal untuk meningkatkan ketampilan penyandang disabilitas dalam berwirausaha. Dalam pelatihan tata boga, penyandang disabilitas diberikan pengajaran cara pembuatan *french fries* atau kentang goreng sedangkan pelatihan kewirausahaan diberikan pelatihan belajar merajut dan membuat aksesoris.

c. Workshop dan pelatihan ketrampilan tata rias dan busana kebaya

Kegiatan ini merupakan realisasi program kemitraan masyarakat Universitas Pancasakti (UPS). Workshop ditujukan dengan pemberian materi motivasi bekerja dan peluang usaha melalui kemampuan dasar rias dan busana kebaya. Adapun pelatihan yang diberikan berupa pendampingan proses pembuatan busana kebaya dan cara merias.

d. Pelatihan Batik Ciprat

Pelatihan batik ciprat dilaksanakan untuk anggota Forum Desa Inklusi Bogares Kidul dan anggota Komunitas DSM sebagai realisasi pelaksanaan program desa inklusi dan upaya peningkatan ekonomi bagi penyandang disabilitas,

3. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual dan Kecakapan Ketrampilan

Menurut Ambar teguh Sulistiyani (2017 :84), tahap peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan merupakan tahap dimana kelompok sasaran pemberdayaan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang akan diarahkan menuju kemandirian. Pada proses pemberdayaan tahapan ini dapat dilihat dari aktivitas yang berupa praktik pengetahuan pengembangan jiwa kewirausahaan dan pemberian akses pasar dan informasi kepada sasaran pemberdayaan untuk membentuk kemampuan kemandirian. Kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) dalam tahap ini diantara sebagai berikut :

a. Pelatihan kewirausahaan marketing

Kegiatan pelatihan ini diadakan oleh *Human Initiative (HI)* dan Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Melalui pelatihan marketing didapatkan pengetahuan bagi penyandang disabilitas yang telah memiliki usaha tentang bagaimana cara untuk memasarkan produknya baik melalui platform *online* maupun *offline*.

b. Pameran, Bazaar/ EXPO

Untuk menunjang kemandirian, Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) berusaha membantu penyandang disabilitas terkait akses dan informasi pasar. Hal tersebut diberikan melalui pemberian informasi tentang pengadaan pameran, bazaar atau EXPO untuk memamerkan produk-produk dari usaha yang dimiliki oleh anggota Komunitas DSM supaya dapat menciptakan peluang usaha yang lebih luas

c. Difabel Pasar Festival

Kegiatan tersebut diadakan sebanyak dua belas kali, dimana enam komunitas penyandang disabilitas yang tergabung dalam kelompok UMKM untuk menjual hasil produk usahanya dengan keterlibatan kelompok penyandang disabilitas yang tergabung dalam kelompok kesenian.

d. Pendampingan batik ciprat Desa Bogares

Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) dalam program pengembangan desa inklusi melakukan pendampingan dari pelatihan hingga pemasaran produk batik ciprat Desa Bogares.

e. Bantuan alat dan modal usaha

Untuk menunjang kemandirian, bantuan peralatan produksi pernah didapatkan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) seperti alat sablon dari Bank Indonesia (BI), bantuan modal usaha dari *Human Initiative (HI)* dan bantuan dari Balai Kartini

Temanggung berupa satu set alat usaha mesin jahit dengan waring dan kursi roda serta satu bal makanan kering produk yang siap di usahakan. Bantuan dan dukungan lain juga pernah didapatkan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri yaitu berupa dana untuk pembangunan rumah produksi difabel yang dapat digunakan sebagai tempat produksi penyandang disabilitas melakukan usahanya yang diberikan oleh Bank Jateng Cabang Slawi dan PT Merdeka Bahari Indonesia.

B. Social Capital Dalam Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Woolcock (2001 : 10-11) menjelaskan *social capital* sebagai jaringan sosial pada komunitas dapat di bedakan menjadi tiga yakni *bonding social capital*, *bridging social capital*, *linking social capital*. Untuk melihat peran social capital dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) dapat dilihat dari ketiga bentuk *social capital* yang ada pada pemberdayaan sebagai berikut :

1. Bonding Social Capital

Woolcock (2001 : 10) menjelaskan bahwa *bonding* merupakan adanya ikatan antara individu yang memiliki kesamaan situasi pada suatu komunitas. Ikatan kuat dalam komunitas dapat dilihat dari hubungan solidaritas dan kepentingan kelompok misalnya kepercayaan dan empati atau rasa saling peduli dalam anggota komunitas. Adanya ikatan yang kuat sesama dalam anggota akan menumbuhkan kerja sama dalam internal dalam kelompok yang dapat mengantarkan pada proses pembentukan jaringan. Pada penelitian ini ditemukan peran *bonding social capital* yaitu membangun rasa saling percaya baik dalam bekerjasama maupun saling percaya dalam mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas yang disertai juga tumbuhnya perasaan senasib dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. *Bonding social capital* dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) dapat dilihat dari kegiatan pemberdayaan diantaranya *home visit*, pertemuan rutin, pelatihan motivasi dan pengembangan diri difabel dan OPYMK serta temu komunitas.

2. Bridging Social Capital

Menurut Woolcock (2001 : 10), *Bridging social capital* merupakan jaringan sosial yang mengacu pada hubungan yang terjalin antara komunitas dengan komunitas lain. Hubungan yang terjalin tersebut dapat mencakup kerjasama atau kolaborasi dengan kelompok lain, asosiasi eksternal, mekanisme dukungan sosial atau berbagai informasi lintas komunitas dan kelompok. Pada penelitian ini, *Bridging social capital* berperan dalam terselenggaranya kegiatan seperti pelatihan dan akses

pasar untuk penyandang disabilitas serta didapatkannya support atau dukungan dalam pendanaan maupun kegiatan pendampingan pada kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas. Bridging social capital dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) berupa terjalinnya hubungan kerjasama dengan komunitas lainnya diantaranya sebagai berikut :

- a. NLR Indonesia merupakan organisasi yang bergerak pada penanganan kusta dan inklusi bagi penyandang disabilitas termasuk akibat kusta. Organisasi mitra ini berperan dalam mendukung pendanaan dan pendampingan atas semua kegiatan yang diadakan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) terkait dalam program pengembangan desa inklusi. Program pelatihan yang telah berjalan meliputi Pelatihan Motivasi dan Pengembangan Diri Difabel dan OPYMK serta pelatihan batik ciprat dan pendampingan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) untuk Forum Inklusi Desa Bogares Kidul.
- b. *Human Initiative* (HI) merupakan organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan dalam program pemberdayaan masyarakat. *Human Initiative* (HI) telah membantu dalam memberikan program pelatihan kewirausahaan dan marketing dan bantuan modal usaha bagi anggota Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM).
- c. Lima komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu Komunitas Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia, Komunitas Cerebral Palsy Trengginas, Komunitas Gerkatin dan Komunitas Mari Belajar Bimbingan Belajar Anak Autis (Marble) serta Komunitas Dunia Tak Lagi Sunyi (DTLS). Hubungan ini dapat terlihat dari adanya kegiatan Temu Komunitas yang mana kegiatannya berisi koordinasi dan saling *sharing* kendala dalam organisasi. Adapun dalam kegiatan Difabel Pasar festival, dimana kegiatan tersebut juga melibatkan seluruh komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal termasuk Komunitas DSM.

3. *Linking Social Capital*

Menurut Woolcock (2001: 11), *Linking social capital* merupakan jaringan sosial yang mengacu pada terjalinnya hubungan antara komunitas dengan dengan anggota luar organisasi atau komunitas seperti pemerintah. Pada penelitian ini, *Linking social capital* berperan dalam peningkatan pengetahuan terkait pemasaran dan juga ketersediaan akses dan informasi pasar serta bantuan alat usaha dan dana yang dapat digunakan untuk menunjang usaha bagi penyandang disabilitas. *Linking social capital* berupa terjalinnya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki

pengaruh kuat diantaranya dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Dinas UMKM Kabupaten Tegal, Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tegal dan Pemerintah Desa. Selain dengan pemerintah, Komunitas Difabel Slawi Mandiri juga (DSM) menjalin hubungan dengan Universitas Pancasakti (UPS) dalam Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dan diperolehnya bantuan yang didapatkan dari Balai Kartini Temanggung, Bank Jateng Cabang Slawi dan PT Merdeka Bahari Indonesia serta Bank Indonesia.

Penutup

Hasil dari analisa penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilihat dari ketiga tahapannya yaitu, penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan serta tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan telah mampu dilaksanakan dengan baik oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM). Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM) telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih terdapat keterbatasan partisipasi penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan tersebut yang disebabkan oleh keterbatasan kuota dan juga perubahan emosional yang sewaktu-waktu dialami oleh penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan yang hanya dilakukan dalam waktu satu kali saja sehingga hal tersebut dirasa kurang karena tidak ada tindak lanjut bimbingan dari pelatihan yang telah dilakukan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, *social capital* memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM). Namun berkaitan dengan *social capital* atau jaringan sosial dalam Komunitas Difabel Slawi Mandiri (DSM), terdapat kendala pada keterbatasan anggota yang pasif di komunitas. Hal tersebut dikarenakan hanya pengurus atau beberapa anggota saja yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas akibat terkendalanya akses dan juga rasa kurang percaya diri penyandang disabilitas yang terkadang masih melekat sehingga malu untuk berpartisipasi dan bergabung dalam kegiatan komunitas.

Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti mengajukan saran diantaranya sebagai berikut :

1. Lembaga pemerintah misalnya Dinas Sosial Kabupaten Tegal perlu meningkatkan anggaran bagi terselenggaranya kegiatan pemberdayaan sehingga terdapat upaya penambahan hari dan kuota peserta kegiatan. Penambahan hari perlu dilakukan supaya kegiatan pemberdayaan tidak hanya dilakukan satu hari saja yang dirasa bagi penyandang disabilitas satu hari

tidak cukup karena penyandang disabilitas tidak menekuni dengan serius kegiatan seperti pelatihan yang didapatkannya. Penambahan kuota peserta juga penting dilakukan mengingat banyaknya penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal sehingga yang penerima manfaat pelatihan dapat meningkat.

2. Perlu adanya kegiatan penguatan anggota komunitas agar baik pengurus maupun anggota dapat berpartisipasi secara aktif dalam dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan. Kegiatan penguatan kapasitas komunitas dapat dilakukan dengan pembentukan kelompok pengembangan komunitas yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh setiap anggota komunitas misalnya memiliki kendala dalam akses. Hal tersebut bertujuan supaya terdapat keterbukaan komunikasi bagi seluruh anggota komunitas sehingga dapat membantu satu sama lain dan salig peduli.
3. Komunitas perlu mengaktifkan kembali kegiatan *sharing motivation* secara rutin bagi anggota komunitas yang mana sebelumnya telah dimiliki oleh komunitas namun sudah tidak aktif lagi sekarang. *Sharing motivation* bagi anggota komunitas perlu dilakukan agar membangkitkan rasa percaya diri bagi anggota supaya aktif terlibat dalam kegiatan komunitas.

Referensi

- Adhi, P.P. (2023). Difabel Slawi Mandiri Dorong Wujudkan dan Kembangkan Desa Inklusi di 5 Kecamatan di Kabupaten Tegal. Retrieved from <https://panturapost.com/difabel-slawi-mandiri-dorong-wujudkan-dan-kembangkan-desa-inklusi-di-5-kecamatan-di-kabupaten-tegal/>
- Bappeda Kab.Tegal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Kabupaten Tegal. Retrieved from https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=62
- Choi, B.; Yi, E. (2022) *The Impact of Income and Social Capital on the Health of People with Developmental Disabilities. Healthcare.* 1-10. <https://doi.org/10.3390/healthcare1008154>
- Ebrahim, A.; Lorenzo, T.; Kathard, H. (2022). *Traversing Disability: Building Social Capital through Skill Development for Employment. Disabilities.* 439–450. <https://doi.org/10.3390/disabilities2030031>
- Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung. PT Refika Aditama
- Ife, J dan Tesoriero, F. 2014. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hidayatullah, A.N., Pranowo. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal PKS.* 17(2). 195-206.
- Open Data Kabupaten Tegal. (2019). Retrieved from : http://data.tegalkab.go.id/mn_MN/dataset/banyaknya-penyandang-masalah-

kesejahteraan-sosial-di-kabupaten-tegal/resource/a699995e-21ad-475f-8f35-e610de00770d

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Rifai, A.A dan Humaedi, S. (2020) Inklusi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs). Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. 7 (2). 449 – 458

Setiyaningsih, K., Yuliani, S. (2022). *Community Governance* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas (Studi Pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM)) Jurnal Mahasiswa Wacana Publik. 2(2). 332-346

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sulistiyani, A.T. (2017). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Edisi Kedua. Yogyakarta: Gava Media.

TNP2K Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. (2018). Retrieved from <http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran/>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Woolcock, M. (1989). *Social Capital and Economic Development : Towards a theoretical sybthesis and polivy framework, in theory aand society*. 27(2). 151-208

Woolcock, M. (2001). *The Place of Social Capital in Understanding Social and Outcomes. Canadian Journal of Policy Research*. 2(1). 1-27

Young, R, Reeve, M dan Grills, N. (2015). *The Functions of Disabled People's Organisations (DPOs) in Low and Middle-income Countries: a Literature Review*. 27(3). 45-69.

Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.